

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam bidang Keuangan Negara ini terjadi perubahan yang signifikan mengenai reformasi, yakni perubahan dalam bidang Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan manifestasinya, globalisasi dalam suatu pemerintahan yang lebih baik ini dimaksudkan agar dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam upayanya untuk mengelola keuangan *good governance* (negara yang baik). Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2010) Tata pemerintahan yang baik di sektor publik (*good governance*) adalah suatu sistem atau kode etik yang mengatur tentang pengelolaan kewenangan pejabat pemerintah dalam akuntabilitas dan kinerja yang bertanggung jawab. Metode akuntansi adalah proses atau bahkan pengetahuan tentang pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan penyajian dengan cara-cara tertentu.

SAP terdapat peraturan yang mengatur tentang akuntansi aset tetap yaitu pernyataan SAP Nomor 07. Berdasarkan dengan PSAP No.07 Aset menurut PASAP No.07 yaitu merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/untuk dimiliki oleh pemerintah sebagai aktivitas operasi. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tetap adalah Aset yang bersifat waktu panjang dan mempunyai nilai manfaat dimasa yang akan datang, aset ini merupakan aset berwujud oleh sebab itu memiliki bentuk atau wujud fisik, aset ini digunakan oleh perusahaan dan bukan dijual untuk kegiatan operasi normal (James,2010). Aset tetap yang baik.

Dapat dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli dan terampil, maksudnya ahli dan tahu betul tentang perlakuan aset tetap sesuai dengan standar. Aset yang diperlukan sebagaimana mestinya akan menjadi sumber keuntungan juga dapat nilai lebih jika sudah tidak dipakai lagi dapat dijual kembali.

Kabupaten Karanganyar memiliki beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) salah satunya Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar mengatur pelayanan publik terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Usaha (SIUP) yang tentunya memiliki aset jangka panjang untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.

Perusahaan untuk mencapai tujuannya, maka harus membenahi setiap aspek dalam internal perusahaan. Terutama dalam penyusunan laporan keuangan, salah satunya komponen yang sangat berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan adalah aset tetap. Aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang. Aset ini merupakan aset berwujud karena memiliki bentuk fisik, aset ini digunakan perusahaan dan tidak dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi (James, 2010).

Aset tetap yang baik, membutuhkan sumberdaya manusia yang ahli dan terampil, maksudnya ahli dan tahu betul tentang perlakuan aset tetap sesuai standar. Seperti perkiraan masa manfaat aset, pencatatan penyusutannya, pencatatan dalam laporan keuangannya serta penghentian aset tetap nantinya jika sudah tidak bisa digunakan lagi dalam kegiatan operasional perusahaan. Aset yang diperlukan sebagaimana mestinya akan menjadi sumber keuntungan juga dapat nilai investasi jika sudah tidak dibutuhkan lagi dapat dijual kembali. Sebab

itu perusahaan harus tepat dalam menentukan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja atau pegawai untuk kesuksesan perusahaannya demi tercapainya tujuan dimasa mendatang. Salah satu adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perwujudan tata kelola yang baik diperlukan perubahan paradigma pemerintahan baru yang mendasar dan menuntut suatu sistem yang mampu memberdayakan daerah agar dapat berkompetisi secara regional, nasional maupun internasional yang tidak hanya menjadi pemerintah daerah yang terus menerus tergantung pada pemerintah pusat.

Dalam suatu organisasi, ketersediaan sumber daya manusia dianggap sebagai keuntungan yang luar biasa di dalam sebuah organisasi tersebut. Kompetensi dan bakat dasar energi manusia menentukan keberhasilan suatu institusi. akar energi insan bakal beroperasi dengan cara ideal apabila institusi mampu mensupport kesuksesan pekerjaan mereka dengan memandang macam mana kompetensi mereka yang sesungguhnya. Pengembangan pangkal energi insan berlandas Kompetensi bakal mempermahal inventivitas karyawan penguasa alhasil diharapkan mutu kegiatan yang diperoleh lebih tinggi serta berakhir pada puasnya rakyat serta institusi bakal diuntungkan Pengembangan pangkal energi insan berlandas kompetensi dilakoni supaya dapat memberi hasil yang selaras dengan tujuan dan maksud lembaga dengan menggunakan standar kemampuan yang sebelumnya sudah ditentukan dan ditetapkan.

Kompetensi yang dimiliki satu orang karyawan dengan cara perseorangan patut mampu mensupport penerapan visi serta tujuan institusi yaitu jalur dalam menaikkan inventivitas institusi itu sendiri. Kekecewaan yang dirasakan oleh pangkal energi insan dalam memahami dan juga mengaplikasikan ilmu akuntansi bakal mempunyai imbas pada kabar moneter, seperti terdapatnya kekusutan kabar yang dibikin dengan standar yang sudah diresmikan penguasa, alhasil kualitasnya jadi tidak baik (soimah,2014).

Reformasi keuangan eksklusifnya akuntansi bakal kemudian menyusup menjumpai pertumbuhan dari tahun 2000-an yakni, pemakaian pangkal *cash toward accrual* yang diawali tahun 2005 dan Basis akrual yang dijalankan seluruh entitas penguasa di tahun 2015 dengan cara bersama-sama di Indonesia. Pada tahun 2005, penguasa mengenai standar akuntansi pemerintah (SAP) berlandas *Cash toward Accrual*.

Pemerintah pusat di tahun 2010 mengimplementasikan Peraturan penguasa Nomor 71 Tahun 2010 perihal Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berlandaskan sepenuhnya *accrual* dibantu dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 pasal 10 ayat (2) yang menerangkan pelaksanaan standar akuntansi berlandas akrual pada negeri teritori setidaknya di tahun 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang diterapkan ini menghasilkan pergantian besar dan signifikan dalam sistem pemberitahuan moneter di Negara Indonesia, yakni pergantian dari basis kas mengarah akrual selaku basis akrual penuh dalam pengakuan perundingan moneter negeri. transformasi sarang itu tidak hanya sudah diperintahkan pada Undang-undang keuangan negeri, pula dengan harapan agar dapat sanggup memberikan lukisan yang utuh berlandaskan

posisi moneter, menyajikan data yang sesungguhnya tentang hak serta peranan, serta berkhasiat dalam menilai kinerja.

Laporan keuangan yakni prasarana infrastruktur informasi moneter paling utama dalam pihak-pihak luar. mutu penjelasan moneter ialah dimana penjelasan moneter yang dihadangkan mampu membuktikan informasi yang cocok, tepat serta jujur. mutu penjelasan moneter dipakai selaku dasar pengumpulan keputusan ekonomi buat pihak yang bersangkutan. Oleh karna itu asal muasal energi individu yang profesional sungguh diinginkan dalam penggarapan penjelasan moneter yang berbobot. Dalam pengelelolaan keuangan entitas yang positif dan tepat, tenaga kerja wajib mempunyai konteks balik akuntansi yang positif, mencontoh pembelajaran dan penataran pembibitan dan pastinya punya pengalaman yang positif dibidang akuntansi.

Peneliti kemudian mencoba untuk menyoroti pertanyaan tentang Kualitas penyusunan laporan keuangan terhadap aset tetap di Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Karanganyar. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyusun terkait “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Aset Tetap Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada BKPSDM Kabupaten Karanganyar)” adalah judul penelitian ini.

## **2. Batasan Masalah**

Batasan Masalah pada penelitian ini adalah:

Penerapan standar akuntansi pemerintahan Penyusunan rekening keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Penyusunan Laporan Keuangan

dalam Menghasilkan Laporan Keuangan yang Berkualitas.

### **3. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Aset Tetap pada BKPSDM sudah sesuai dengan konsep dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010?
2. Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk menyusun Laporan Keuangan yang berkualitas?
3. Apakah Laporan Keuangan yang diterbitkan BKPSDM Memenuhi Standar Kualitas Laporan Keuangan terdiri dari Andal, Relevan, Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010?

### **4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisa kesesuaian Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan Tentang Aset Tetap pada Badan Kepegawaian dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.
2. Mengetahui Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.
3. Mengetahui Apakah Laporan Keuangan yang diterbitkan BKPSDM Memenuhi Standar Kualitas Laporan Keuangan terdiri dari Andal, Relevan, Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010.

## **5. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Temuan penelitian ini kemungkinan akan berkontribusi pada pertumbuhan literatur akuntansi sektor publik dengan memberikan wawasan dan pengetahuan lebih lanjut tentang penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap aset tetap yang akurat dan sesuai.

### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bisa dengan cara mempelajari melihat hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan pembinaan dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Aset Tetap dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan dan penelitian ini bermanfaat dapat menambah pengetahuan mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.